



EDISI RABU 22 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Pelantikan 5 Pejabat Baru BGN Dibayangi Kasus
Dugaan Keracunan

05

NUSANTARA
Aceh Tenggara Atur Ketat Pembelian BBM Subsidi
Wajib Tunjukkan STNK dan Batasi Pembelian

10

LISTSTYLE
Kebangkitan Estetika Liar Animal Print dalam Street Style

25 KEPALA DAERAH

STUDI BANDING KE SINGAPURA, MACAN OMPONG EFISIENSI?

Kebijakan pengetatan anggaran negara terancam sekadar menjadi macan ompong efisiensi alias aturan yang hanya garang di atas kertas. Hal ini seiring langkah Lemhannas memboyong 25 kepala daerah untuk studi banding ke Singapura pada 15-28 Juli 2026. Keberangkatan puluhan pejabat daerah ini menuai kritik pedas dari Ketua DPR RI Puan Maharani hingga pengamat otonomi daerah. Mereka kompak menilai izin perjalanan luar negeri tersebut mencederai komitmen penghematan anggaran pemerintah. Menanggapi sorotan publik, pihak pemerintah menegaskan kegiatan di Lee Kuan Yew School of Public Policy tersebut bukan agenda plesiran, melainkan investasi strategis yang mewajibkan peserta menghasilkan proyek perubahan. Kendati demikian, Ombudsman RI mendesak adanya pengawasan ketat dan indikator keberhasilan yang transparan. Apalagi pemerintah sebelumnya telah mencanangkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 70 persen demi menjaga stabilitas fiskal dan menekan defisit APBN 2026. BACA HAL 11...

Wali Kota (2 Daerah)

- Wali Kota Lhokseumawe (Aceh)
- Wali Kota Pangkalpinang (Kepulauan Bangka Belitung)

Bupati (23 Daerah)

Sumatera & Jawa:

- 3. Bupati Aceh Besar (Aceh)
- 4. Bupati Kerinci (Jambi)

- 5. Bupati Muaro Jambi (Jambi)
- 6. Bupati Seluma (Bengkulu)
- 7. Bupati Tulang Bawang Barat (Lampung)
- 8. Bupati Lebak (Banten)
- 9. Bupati Banjarnegara (Jawa Tengah)

Kalimantan & Sulawesi:

- 10. Bupati Kotawaringin Barat (Kalteng)
- 11. Bupati Sukamara (Kalteng)
- 12. Bupati Hulu Sungai Tengah (Kalsel)
- 13. Bupati Sinjai (Sulsel)
- 14. Bupati Polewali Mandar (Sulbar)

Nusa Tenggara, Maluku & Papua

- 15. Bupati Sumbawa Barat (NTB)
- 16. Bupati Flores Timur (NTT)

**Daftar 25 kepala daerah
Indonesia yang terpilih
dalam program KPPD
Angkatan III Lemhannas
RI ke Singapura**

- 17. Bupati Lembata (Nusa Tenggara Timur)
- 18. Bupati Halmahera Tengah (Maluku Utara)
- 19. Bupati Pulau Morotai (Maluku Utara)
- 20. Bupati Maluku Tengah (Maluku)
- 21. Bupati Kepulauan Tanimbar (Maluku)
- 22. Bupati Biak Numfor (Papua)
- 23. Bupati Manokwari (Papua Barat)
- 24. Bupati Intan Jaya (Papua Tengah)
- 25. Bupati Mimika (Papua Tengah)



PELANTIKAN 5 PEJABAT BARU BGN DIBAYANGI KASUS DUGAAN KERACUNAN

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melantik lima pejabat madya baru untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di tengah upaya memperkuat organisasi, program prioritas nasional itu kembali dihadapkan pada persoalan keamanan pangan setelah dugaan keracunan massal kembali dilaporkan di dua daerah pada hari yang sama, Selasa (21/7).

Pelantikan dilakukan di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi BGN, mulai dari tata kelola pengadaan hingga pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan kepada jutaan penerima manfaat MBG.

Lima pejabat yang dilantik mengisi sejumlah jabatan strategis, mulai dari Sekretaris Utama hingga deputy yang menangani penyediaan dan penyaluran.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Zainuri sebagai Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Posisi ini memegang peran penting dalam memastikan rantai pasok MBG berjalan efektif, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penyaluran makanan kepada penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari secara khusus menyatakan keyakinannya bahwa Zainuri mampu memperbaiki tata kelola pengadaan, termasuk mencegah terulangnya polemik pengadaan motor listrik yang sebelumnya menuai sorotan publik.

Selain itu, BGN juga menarik dr.



Budi Sylvana, MARS untuk menduduki jabatan Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola. Sebelum bergabung dengan BGN, Budi merupakan pejabat di Kementerian Kesehatan dan memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan sistem pelayanan kesehatan serta manajemen rumah sakit. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkuat penyusunan standar operasional,

sistem pengawasan, hingga tata kelola pelaksanaan MBG yang kini menjangkau jutaan penerima manfaat diseluruh Indonesia.

Tiga pejabat lainnya yang turut dilantik yakni Mayjen TNI (Purn.) Yustinus Nono Yulianto sebagai Sekretaris Utama, Tatan Rustandi sebagai Inspektur Utama, dan Kolonel Inf. Lalu Muhammad Saleh sebagai Deputy Bidang Promosi

dan Kerja Sama.

Sekretaris Utama bertugas mengoordinasikan administrasi dan dukungan manajemen organisasi, Inspektur Utama mengawasi pelaksanaan program agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik, sedangkan Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama bertanggung jawab memperluas kolaborasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun berbagai pemangku kepentingan guna mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Agustina Arumsari mengatakan kehadiran pejabat baru diharapkan memperkuat pengelolaan program, termasuk memastikan proses pengadaan berjalan lebih baik. Ia juga menegaskan polemik pengadaan motor listrik yang sempat menjadi sorotan tidak akan kembali terulang.

"Motor listrik, nggak akan terulang tuh. Yakin saya," kata Agustina di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Agustina, motor listrik yang telanjur dibeli menggunakan anggaran negara kemungkinan akan dialihkan pemanfaatannya kepada kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan.

Kasus di Blora-Kulon Progo

Di saat BGN memperkuat struktur organisasinya, dugaan keracunan kembali mencuat dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Sebanyak 19 siswa SD Negeri Sendangrejo, Kecamatan Ngawen, mengalami gejala setelah menyantap menu MBG pada Senin (20/7). Para siswa sempat menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Ngawen sebelum akhirnya diperbolehkan pulang.

Bupati Blora Arief Rohman memastikan seluruh siswa telah kembali ke rumah dan kondisinya terus dipantau.

"Sudah pulang semua dan dipantau sampai hari ini tidak ada gejala yang muncul lagi," ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogowanti yang memasok makanan ke sekolah tersebut dihentikan operasionalnya sementara sejak Selasa (21/7).

Data Dinas Kesehatan Blora menunjukkan SPPG tersebut selama ini melayani 2.341 penerima manfaat MBG di wilayah itu. Menu yang disajikan pada hari kejadian terdiri atas nasi putih, telur bumbu kuning, tumis kacang panjang, wortel dan putren (jagung muda), buah anggur, serta susu kemasan.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal Dinas Kesehatan Blora, dugaan sementara mengarah pada susu kemasan yang diduga tidak disimpan sesuai standar sehingga kualitasnya menurun. Meski demikian, penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. (gus,ist,kcm/dya)

Sinyal Anggaran MBG Dipangkas Rp39 Triliun

BADAN Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 berpotensi mengalami efisiensi sekitar Rp39 triliun. Alokasi yang semula diproyeksikan mencapai Rp268 triliun kini diperkirakan turun menjadi sekitar Rp229 triliun seiring proses perbaikan tata kelola dan penataan ulang penerima manfaat.

Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan angka tersebut masih bersifat sementara. Menurut dia, BGN masih memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan penyisiran data dan menyusun skema pelaksanaan program yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

"Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp268 triliun itu menjadi Rp229 triliun," kata Lili dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7).

Ia menegaskan, efisiensi bukan dilakukan dengan mengurangi kualitas layanan, melainkan melalui

penataan kembali pelaksanaan program. Salah satunya adalah refocusing atau penyisiran ulang data penerima manfaat serta penyesuaian berbagai komponen belanja agar penggunaan APBN lebih tepat sasaran.

"Ini yang sedang dilakukan oleh kami untuk bisa menyusun kembali hal-hal apa saja yang nantinya akan berpengaruh agar APBN ini kita bisa laksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan kebutuhan anggaran akan otomatis menyesuaikan setelah pemerintah merapikan basis data penerima manfaat MBG. Hasil penyisiran sementara menunjukkan jumlah penerima berada di kisaran 62,7 juta orang.

"Dengan hasil penyisiran tadi sekitar 62,7 juta penerima manfaat, saya yakin nanti otomatis akan mengikuti. Angkanya sekarang sebenarnya sudah ada gambarnya akan turun dari itu, tapi angka

finalnya masih menunggu sampai benar-benar final," kata Agustina.

Sehari sebelumnya, Agustina juga mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran MBG dipastikan tidak lagi sebesar Rp268 triliun. Namun, ia belum bersedia menyebutkan angka pasti karena proses evaluasi masih berlangsung.

Menurutnya, efisiensi dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola yang diminta Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diberi waktu sekitar satu bulan untuk menyusun skema baru agar pelaksanaan MBG lebih efektif sekaligus menghindari pemborosan anggaran.

Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah menghapus pendekatan biaya makan yang seragam di seluruh daerah. Selama ini, nilai anggaran sekitar Rp15.000 per porsi diterapkan secara umum, padahal harga bahan pangan berbeda di setiap wilayah. Ke depan, besaran biaya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah sehingga dinilai lebih realistis dan efisien. (tin,ist/dya)

DIKEBUT 2 PEKAN, UU PUSAT FINANSIAL INTERNASIONAL DISAHKAN DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (21/7/2026). Meski demikian, bukan hanya substansi aturan yang menjadi perhatian, melainkan juga proses pembahasannya yang berlangsung dalam waktu relatif singkat. RUU tersebut rampung dibahas hingga disahkan hanya sekitar dua pekan setelah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Kecepatan itu memunculkan sorotan karena regulasi yang akan menjadi landasan pembentukan pusat finansial internasional dinilai memiliki cakupan yang luas dan konsekuensi besar terhadap tata kelola sektor keuangan nasional.

Pemerintah beralasan percepatan dilakukan karena pembentukan UU PFII merupakan amanat Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Aturan tersebut mewajibkan pembentukan payung hukum PFII paling lambat tiga bulan sejak UU P2SK diundangkan pada 17 Juni 2026.

Wakil Ketua Komisi XI DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PFII, Mohamad Hekal, membantah pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa. Menurut dia, percepatan dilakukan untuk memenuhi amanat undang-undang sekaligus menangkap peluang perpindahan dana global yang dinilai tidak akan berlangsung lama.

"Ya tidak buru-buru juga. Memang ini kan merupakan perintah dari Undang-Undang P2SK," kata Hekal kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Hekal menjelaskan, semula ketentuan mengenai PFII direncanakan dimuat dalam UU P2SK. Namun, karena cakupan pengaturannya cukup besar, pembahasannya dipisahkan menjadi undang-undang tersendiri.

"Tapi memang ini menjadi program yang agak kita dahulukan," ujarnya.

Ia menuturkan Panja tetap melalui tahapan pembahasan sebagaimana mestinya. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar pada 6, 8, dan 9 Juli 2026 dengan menghadirkan akademisi, kementerian dan lembaga, regulator, pelaku industri jasa keuangan, serta asosiasi profesi.

"Pada RDPU tersebut, Panja RUU tentang PFII mendengarkan dan mendapatkan masukan yang sangat konstruktif terkait berbagai aspek pengaturan dalam RUU dari berbagai pihak dan stakeholders," kata Hekal.

Setelah menyerap masukan publik, Panja membahas substansi RUU pada 9, 13, 14, 15, dan 16 Juli 2026. Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kemudian menyempurnakan rumusan pasal-pasal pada 17-19 Juli sebelum hasilnya dilaporkan kepada Panja.

Tahap akhir berlangsung tak kalah cepat. Pada 19 dan 20 Juli, Panja kembali menggelar rapat



Menkeu Purbaya (kiri) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (ketiga kanan) dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026). ant.ist

penyempurnaan dan finalisasi draf. Di hari yang sama, 20 Juli, DPR bersama pemerintah langsung menggelar rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I. Sehari berselang, RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna dan resmi disahkan menjadi undang-undang.

"Selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Juli 2026, rapat Panja melakukan penyempurnaan dan finalisasi draf RUU tentang PFII. Pada hari yang sama, 20 Juli 2026, dilanjutkan dengan rapat kerja pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat I," ujar Hekal.

Menurut Hekal, percepatan juga didorong oleh persaingan antarnegara dalam membangun pusat keuangan internasional. Indonesia, kata dia, harus bergerak cepat agar tidak kehilangan momentum menarik arus modal global.

"Karena di negara-negara lain banyak yang baru saja juga melahirkan financial center baru. Kita dengar di Uzbekistan baru melahirkan, di Vietnam malah meluncurkan dua sekaligus. Jadi kita memang agak dalam proses balap-balapan," katanya.

Ia menilai momentum perpindahan dana global tidak akan berlangsung selamanya. Setelah investor menentukan negara tujuan untuk menempatkan modalnya, mereka cenderung tidak akan kembali memindahkan dana dalam waktu dekat.

"Kita harus tangkap dia sedini mungkin. Jadi harapannya secepat mungkin," ujarnya.

Melalui PFII, pemerintah juga membidik dana yang selama ini dikelola berbagai family office di pusat-pusat keuangan dunia. Hekal menyebut sebagian kekayaan milik warga Indonesia maupun investor asing selama ini ditempatkan di Singapura, Hong Kong, dan sejumlah pusat keuangan internasional lainnya.

"Selama ini, termasuk sebagian uang orang Indonesia kan mencari tempat kita dengar seperti Singapura, Hong Kong, dan lain-lain. Mereka boleh taruh di situ (PFII). Dan lebih lagi, kita berharap uang orang lain yang ada di luar negeri bisa taruh di situ," katanya.

Ia mengungkapkan aset yang dikelola family office secara global diperkirakan mencapai sekitar 3,2 triliun dolar AS, dengan sekitar 65 persen di antaranya sedang mencari lokasi penempatan baru di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kenapa mereka cari 'rumah' baru? Karena 'rumah-rumah' mereka sedang terguncang. Ada yang 'rumahnya' di Timur Tengah. Salah satu yang besar yang mencari 'rumah baru' adalah di daerah Amerika. Nah, itu kita harapkan kita bisa segera bentuk PFII kita," ujarnya.

Selain menjadi pintu masuk investasi asing, PFII diharapkan mampu meningkatkan likuiditas valuta asing sehingga memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi program-program pertumbuhan

POIN PENTING UU PUSAT FINANSIAL INTERNASIONAL INDONESIA

Pembentukan Kawasan PFII

Menetapkan dasar hukum pembentukan kawasan pusat finansial internasional di Indonesia. Bertujuan meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional.

Kegiatan Usaha

Mengakomodasi jasa keuangan, usaha penunjang, dan sektor lain yang ditetapkan pemerintah.

Pengelola Khusus PFII

Dibentuk Gubernur PFII, Dewan PFII, Lembaga Pengelola, dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII.

Pengadilan dan Arbitrase Khusus

Sengketa usaha di kawasan PFII dapat diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase PFII. Dibentuk Pengadilan Khusus PFII.

Insentif Perpajakan

Fasilitas PPh, PPN, PPhBM, kepabeanan, serta insentif bagi investor dan tenaga ahli. Disertai sanksi bagi penyalahgunaan fasilitas.

Kekhususan Kawasan

- Memungkinkan penggunaan valuta asing.
- Mengatur mekanisme perizinan khusus.
- Mengatur penggunaan bahasa hukum dalam aktivitas tertentu.

Dukungan Pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan dukungan bagi operasional dan pengembangan PFII.



ekonomi nasional.

Hekal menyebut Bali menjadi salah satu wilayah yang diproyeksikan sebagai lokasi PFII karena dinilai telah menjadi tujuan utama warga negara asing yang datang ke Indonesia.

"Harapannya adalah mereka di sini, uangnya ikut, peluang investasinya pas ada di depan melalui keberadaan PFII. Jadi mereka keluar masuknya tidak terlalu sulit," katanya. (wid,ktn,ist/dya)

BIAYA LEPAS STATUS WNI NAIK 5 KALI LIPAT MULAI AGUSTUS

Pemerintah resmi menaikkan tarif layanan kewarganegaraan di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk biaya permohonan pelepasan status warga negara Indonesia (WNI) yang naik lima kali lipat menjadi Rp5 juta. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum, yang ditetapkan pada 2 Juli 2026 dan mulai berlaku pada Agustus 2026.



Menkum
Supratman
Andi Agtas

Berdasarkan lampiran PP tersebut, tarif Rp5 juta dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, biaya untuk layanan yang sama hanya sebesar Rp1 juta.

Selain itu, pemerintah juga menaikkan tarif permohonan naturalisasi bagi warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi WNI. Biaya naturalisasi meningkat dari Rp15 juta menjadi Rp75 juta untuk setiap permohonan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan kenaikan tarif tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat luas, melainkan hanya berlaku bagi kelompok tertentu yang mengajukan layanan kewarganegaraan.

"Jadi sama sekali bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7).

Menurut Supratman, jumlah warga yang mengajukan pelepasan kewarganegaraan setiap tahun relatif kecil. Ia memperkirakan hanya

sekitar 200 hingga 300 permohonan yang masuk ke Kementerian Hukum.

"Hanya orang-orang tertentu. Jumlahnya mungkin 100, 200, 300 orang. Dari 300 juta penduduk, apa yang perlu kita resahkan dengan itu?" ujarnya.

Ia juga menyebut mayoritas pemohon pelepasan kewarganegaraan berasal dari kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga kenaikan tarif dinilai tidak menjadi persoalan.

"Jadi itu bukan masalah buat bangsa. Dan rata-rata bagi mereka adalah mereka yang punya kemampuan," kata Supratman.

Terkait kenaikan biaya naturalisasi, Supratman menjelaskan layanan tersebut umumnya diajukan oleh warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk menjadi WNI, yakni telah tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menambahkan, penyesuaian tarif dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kewarganegaraan melalui transformasi digital.

"Sistem yang kita bangun ini harus dipelihara sehingga bisa

menjangkau dan memberi layanan terbaik," ujarnya.

Kebijakan tersebut kemudian mendapat perhatian dari DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kenaikan biaya pelepasan kewarganegaraan tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah warga yang memilih berganti kewarganegaraan.

"Untuk pembayaran sejumlah uang terkait apa namanya perubahan kewarganegaraan, ya kami berharap tidak ada WNI yang mengubah kewarganegaraannya. Semoga semua warga negara Indonesia tetap cinta Indonesia," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/7).

Puan menekankan pentingnya menjaga rasa cinta terhadap Indonesia di tengah perubahan kebijakan administrasi tersebut.

Senada, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan rasa cinta dan memiliki terhadap Tanah Air harus terus ditumbuhkan. Namun, ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan pemerintah tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

"Ya, pertama tentu kita ingin bahwa menumbuhkan rasa cinta terhadap Tanah Air itu penting ya. Rasa cinta, rasa memiliki terhadap

BIAYA LEPAS KEWARGANEGARAAN DI BERBAGAI NEGARA

Indonesia (Sekarang)

RP 5.000.000

- Berlaku berdasarkan PP No. 30 Tahun 2026
- Tarif untuk permohonan kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden

Sebelum

RP 1.000.000

Naturalisasi WNA

■ RP 50.000.000

**■ RP 75.000.000
(NAIK 50%)**

■ Sebelum ■ Sesudah

Perbandingan Negara Lain

Britania Raya:
513 poundsterling (≈Rp11,3 juta)

Amerika Serikat
US\$450 (≈Rp7,3 juta)

Selandia Baru
NZ\$474 (≈Rp4,6 juta)

Kanada
100 dolar Kanada (≈Rp1,2 juta)

Singapura
35 dolar Singapura (≈Rp445 ribu)

Korea Selatan:
20.000 won (≈Rp240 ribu)

Malaysia
10 ringgit (≈Rp35 ribu)

Jerman
Gratis

tanah air itu menjadi hal penting," ujar Saan.

"Nah, terkait dengan hal-hal yang memberatkan warga negara dan sebagainya, itu penting untuk dipikirkan supaya warga negara tidak merasa terbebani," lanjut politikus Partai NasDem itu.

Pemerintah menegaskan kenaikan tarif layanan kewarganegaraan merupakan bagian dari penyesuaian PNBP di Kementerian Hukum dan hanya berlaku bagi pemohon layanan tertentu. Dengan jumlah pemohon pelepasan kewarganegaraan yang hanya ratusan orang dari sekitar 300 juta penduduk Indonesia, pemerintah menilai kebijakan tersebut tidak akan berdampak luas terhadap masyarakat. (wid,ist,kum/dya)

ACEH TENGGARA ATUR KETAT BBM SUBSIDI WAJIB TUNJUKKAN STNK DAN BATASI PEMBELIAN

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mulai memberlakukan aturan baru dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai upaya menertibkan distribusi sekaligus mengatasi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kebijakan tersebut berlaku mulai 21 Juli 2026 hingga pasokan BBM bersubsidi kembali normal.



Ilustrasi antrean BBM di SPBU.dok

A aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Aceh Tenggara Nomor 1003.4.2/18/2026 tentang penertiban pendistribusian BBM bersubsidi yang ditandatangani Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, pada Senin (20/7/2026).

Melalui kebijakan tersebut, setiap pembeli BBM subsidi diwajibkan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan saat melakukan pengisian. Untuk kendaraan roda empat, pembelian juga harus menggunakan barcode MyPertamina.

Selain itu, masyarakat dilarang mengantre di SPBU sebelum pukul 06.30 WIB. SPBU juga tidak diperbolehkan melayani pembelian Paltalite maupun Biosolar menggunakan jeriken atau drum tanpa surat rekomendasi resmi dari instansi yang berwenang, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja.

SPBU juga dilarang melayani kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi maupun pengisian berulang (lansir). Pemerintah daerah turut melarang penimbunan BBM bersubsidi untuk diperjualbelikan kembali secara ilegal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Aceh Tenggara, Zulfan Harijadi, mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi,

terutama pembelian menggunakan jeriken yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

"Maka pemerintah mengeluarkan SE, termasuk pembatasan pembelian BBM," kata Zulfan, Selasa (21/7/2026).

Menurut dia, kewajiban menunjukkan STNK dan barcode MyPertamina bertujuan memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh kendaraan yang berhak.

"Sehingga harganya di pasaran lebih mahal lagi. Aturan ini salah satunya untuk menghindari itu," ujarnya.

Untuk pemerataan distribusi, pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian harian BBM bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan.

Untuk Paltalite, sepeda motor dibatasi maksimal Rp50.000, kendaraan roda tiga maksimal Rp70.000, sedangkan mobil maksimal Rp250.000 dengan barcode MyPertamina.

Sementara untuk Biosolar, kendaraan roda empat dibatasi maksimal Rp250.000 dengan barcode MyPertamina, sedangkan truk dan bus diperbolehkan membeli hingga Rp500.000 dengan barcode MyPertamina.

Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry menegaskan pembatasan tersebut diterapkan untuk menutup celah penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus mengurangi antrean panjang yang belakangan terjadi di sejumlah SPBU.

"Itu agar tidak ada penyalahgunaan pembelian bahan bakar, agar tertib dan antrean panjang bisa kami atasi," kata Salim, Selasa (21/7/2026).

Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperlancar pelayanan pengisian BBM di seluruh SPBU di Kabupaten Aceh Tenggara.

Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara membentuk satuan tugas (satgas) terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Wilayahul Hisbah (WH), Linmas, serta Dinas Perhubungan. Tim tersebut akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala di seluruh SPBU.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran akan dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari penghentian pasokan BBM bersubsidi, usulan pencabutan izin usaha, hingga ancaman pidana sesuai ketentuan

yang berlaku.

Zulfan mengungkapkan antrean panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dipicu oleh berkurangnya pasokan BBM ke wilayah Aceh Tenggara. Namun, pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti penyebab berkurangnya distribusi tersebut.

"Menurut informasi dari pemilik SPBU diprediksi dalam tiga hari ke depan sudah normal kembali. Surat edaran ini sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat, dan hari ini kita sudah mulai berlakukan," pungkasnya.

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menertibkan distribusi BBM subsidi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait implementasi kebijakan tersebut.

"Kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, kami mendukung langkah pembatasan volume pembelian sesuai jenis kendaraan, larangan pengisian menggunakan jeriken tanpa rekomendasi resmi, serta pengawasan bersama oleh pemerintah daerah dan aparat terkait," ujar Fahrougi.

Ia menjelaskan distribusi BBM menuju Aceh Tenggara dilakukan melalui kantor layanan Pertamina di Medan, Sumatera Utara.

Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan serta mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar distribusi BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak. (tin,rls,ant/dya)



Polemik Jalan Tembus Griyashanta

Dipasang Portal, Pemkot Malang Pastikan Uji Coba Tak Terganggu

MALANG - Polemik Jalan Tembus Griyashanta di Kota Malang kembali memanas. Di tengah keputusan warga RW 12 Griyashanta untuk menutup portal gerbang utama dan melanjutkan upaya hukum, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan rencana uji coba fungsional jalur itu tetap berjalan.

"Enggak masalah (portal ditutup). Karena jalan tersebut statusnya sudah menjadi aset pmda, sudah menjadi jalan umum. Nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP terkait tindak lanjut apabila terjadi penutupan akses jalan yang memang merupakan jalan umum," ujar Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Suparno, Selasa (21/7/2026).

Diketahui, keputusan penutupan portal diambil dalam Musyawarah Warga Griyashanta yang digelar di Masjid Ramadhan Griyashanta pada 19 Juli 2026.

Hasil musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 302/BA/RW.12/GS/VII/2026 itu

menyepakati 2 poin utama, yakni melanjutkan proses hukum melalui banding, kasasi, hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta memberlakukan sistem buka-tutup portal di gerbang utama perumahan mulai 20 Juli 2026.

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan, portal dibuka pada pukul 06.00-08.00 WIB dan 15.00-17.00 WIB untuk memberikan akses bagi aktivitas SMP Negeri 18 Malang, SD-SMP Insan Amanah, TK ABA, dan PAUD Omah Bocah.

Sementara di luar jam tersebut, portal ditutup dengan alasan menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan perumahan. Warga juga diarahkan menggunakan akses masuk melalui portal di depan Masjid Ramadhan Griyashanta saat gerbang utama ditutup.

Suparno menjelaskan, persoalan penutupan portal memiliki dasar pengaturan yang berbeda dengan status Jalan Tembus Griyashanta-Candi Panggung. Karena itu, Pemkot tetap mempersiapkan uji coba fungsional sembari menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung di lokasi.

Suparno berharap uji coba jalan dapat dilaksanakan dalam pekan ini. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyempurnaan marka jalan serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU) sebagai syarat pendukung sebelum ruas jalan difungsikan.

"Kami selalu mengedepankan komunikasi baik-baik. Nanti akan kami komunikasikan juga dengan Pak RW dan masyarakat supaya bisa dibuka. Apalagi yang diuji coba ini akses sebelah barat dan masih ada jalan keluar lainnya," tuturnya.

Di sisi lain, Suparno menegaskan proses hukum yang masih ditempuh warga tidak menjadi penghalang bagi Pemkot untuk melaksanakan uji coba jalan. Dijelaskannya, pemerintah hanya menjalankan kewenangannya sebagai pengelola aset daerah, sementara proses hukum tetap dihormati dan

diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihaknya juga mengungkapkan, gugatan yang sebelumnya diajukan warga telah diputus di Pengadilan Negeri Malang dan dikuatkan pada tingkat banding melalui putusan yang terbit pada 9 Juli 2026. Meski demikian, informasi yang diterima Pemkot menyebutkan warga kini melanjutkan perkara tersebut ke tingkat kasasi. (Santi/Dya)



Ilustrasi: Portal masuk perumahan Griyashanta dari arah Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang ditutup warga setempat. (Santi/Lentera)

Didominasi Longsor,

232 Bencana Gempur Kabupaten Malang per Juni 2026



Arsip-Kejadian pohon tumbang akibat cuaca ekstrem di wilayah Pujon, Kabupaten Malang pada Februari 2026 lalu. (foto: Pusdalops BPBD Kab. Malang)

MALANG- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mencatat sebanyak 232 kejadian bencana sepanjang periode 1 Januari-30 Juni 2026. Data BPBD menunjukkan, bencana pada Semester I tahun ini didominasi oleh tanah longsor dan cuaca ekstrem yang paling banyak terjadi di kawasan utara dan barat Kabupaten Malang.

"Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi komprehensif Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops

PB) BPBD Kabupaten Malang. Dari total 232 kejadian, terdiri atas 124 kejadian bencana alam, 6 bencana non alam, 28 kejadian pohon tumbang, serta 74 aktivitas gempa bumi yang dilaporkan tidak menimbulkan kerusakan," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, dalam keterangan resminya, Selasa (21/7/2026).

Dari ratusan kejadian tersebut, BPBD mencatat sebanyak 3 orang meninggal dunia, 7 orang mengalami luka-luka, dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 671 warga terdampak langsung akibat berbagai kejadian bencana.

Disebutkannya, kerusakan juga terjadi pada sektor permukiman. Sebanyak 108 bangunan dilaporkan tergenang, 223 rumah mengalami rusak ringan, 5 rumah rusak sedang, dan 1 bangunan mengalami

rusak berat.

Sementara itu, dampak bencana turut dirasakan pada fasilitas publik. BPBD mencatat 14 infrastruktur umum mengalami kerusakan ringan dan 3 fasilitas pendidikan turut terdampak.

"Di sektor lingkungan dan pertanian, sekitar 15.264 hektare lahan terdampak, disertai kerugian pada sektor peternakan dengan sekitar 25.000 ekor ayam budidaya ikut terdampak akibat kerusakan kandang maupun pengaruh kondisi cuaca," kata Sadono.

Lebih lanjut, dijelaskannya berdasarkan analisis spasial BPBD, wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi terkonsentrasi di kawasan utara dan barat Kabupaten Malang yang didominasi topografi perbukitan serta lereng pegunungan.

"Kecamatan Pujon menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 22 kejadian, disusul Kasembon sebanyak 17 kejadian," ungkapnya.

Menurut Sadono, karakteristik geografis kedua wilayah tersebut

membuatnya lebih rentan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya tanah longsor dan cuaca ekstrem.

Sementara di wilayah tengah hingga timur Kabupaten Malang, menurutnya konsentrasi kejadian bencana bergeser ke kawasan yang memiliki kepadatan permukiman serta aktivitas pertanian dan peternakan. Kecamatan Pakis dan Bululawang masing-masing mencatat 11 kejadian, sedangkan Dampit dan Poncokusumo masing-masing mengalami 10 kejadian.

Sadono menilai tingginya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut membuat dampak bencana juga dirasakan pada sektor ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya, yakni kerugian pada peternakan ayam yang mencapai sekitar 25.000 ekor akibat kerusakan kandang maupun perubahan kondisi iklim mikro selama cuaca ekstrem.

"Jika ditinjau berdasarkan waktu kejadian, frekuensi bencana paling tinggi terjadi pada Januari dengan 57 kejadian, disusul Maret sebanyak 48 kejadian," katanya. (Santi/Dya)

JEJAK KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Mengapa Diperebutkan?

- Luas >3 juta km².
- Jalur 30% perdagangan dunia.
- Kaya minyak, gas, dan ikan.

Akar Sengketa

- China mengklaim hampir seluruh LCS lewat nine-dash line.
- Bertabrakan dengan klaim Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
- Sengketa utama: **Spratly & Paracel**.

Arbitrase 2016

- Filipina menggugat China ke PCA.
- PCA menyatakan nine-dash line tidak sah menurut UNCLOS 1982.
- China menolak putusan.

Eskalasi

- China membangun pulau buatan dan pangkalan militer.
- Bentrokan berulang dengan Filipina dan Vietnam.
- Titik panas: **Second Thomas Shoal**.

Dampak bagi Indonesia

- Indonesia bukan negara pengklaim.
- Klaim China bersinggungan dengan **ZEE Natuna Utara**.
- TNI dan Bakamla memperkuat patroli.

Diplomasi

- 2002: ASEAN-China menandatangani DoC
- Negosiasi Code of Conduct (CoC) masih belum mencapai kesepakatan



Memanasnya situasi terjadi menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela rangkaian pertemuan ASEAN. Pertemuan itu dipandang sebagai momentum penting untuk meredakan ketegangan, namun justru diawali oleh insiden baru di wilayah sengketa Second Thomas Shoal (Ren'ai Jiao) di Kepulauan Spratly.

Militer Filipina menuduh personel Penjaga Pantai China melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang anggota Angkatan Laut Filipina saat menjalankan operasi di kawasan tersebut. Menurut Manila, petugas China memukul personel Filipina menggunakan tongkat ketika kedua pihak berhadapan di laut.

Insiden itu segera memicu protes diplomatik dan memperburuk hubungan kedua negara yang dalam beberapa tahun terakhir memang terus diwarnai konfrontasi di wilayah sengketa.

Presiden Filipina Ferdinand



Militer Filipina menyatakan personel Penjaga Pantai Cina menyerang seorang awak angkatan laut Filipina dengan tongkat kayu hingga mengenai kepala ketika kapal Cina mendekati BRP Sierra Madre, Senin (20/7/2026). (dok.ist)

Laut China Selatan Memanas Lagi

CHINA-FILIPINA BERKONFLIK JELANG PERTEMUAN ASEAN

Pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN di Manila, Filipina, pekan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Insiden terbaru yang melibatkan personel Penjaga Pantai China dan Angkatan Laut Filipina kembali memperlihatkan rapuhnya situasi keamanan di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia itu. Peristiwa tersebut pun menjadi salah satu isu utama yang membayangi agenda diplomasi, di samping konflik di Timur Tengah dan krisis Myanmar.

Marcos Jr. dijadwalkan memanggil Duta Besar China di Manila untuk meminta penjelasan atas insiden tersebut. Sebaliknya, pemerintah China juga memanggil Duta Besar Filipina di Beijing sebagai bentuk protes terhadap tindakan Manila.

Namun, Beijing memberikan versi yang sangat berbeda. Penjaga Pantai China mengklaim kapal mereka sedang melakukan patroli rutin ketika kapal Filipina yang disebut "berada secara ilegal" di sekitar Karang Renai justru melakukan manuver berbahaya.

"Kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan meluncurkan dua perahu karet yang dengan cepat dan berbahaya mendekati dan menabrak kapal patroli China. Kami menuntut agar Filipina segera menghentikan provokasinya," demikian pernyataan Penjaga Pantai China.

China juga menuduh personel Filipina menyerang petugasnya menggunakan dayung dan tongkat panjang. Setelah kejadian itu, menurut Beijing, Manila justru "memutarbalikkan fakta" dengan menuduh China sebagai pihak yang melakukan kekerasan.

Perbedaan narasi tersebut kembali memperlihatkan bagaimana setiap insiden di Laut China Selatan hampir selalu diiringi perang informasi dan saling tuding antara kedua negara. Hingga kini tidak ada mekanisme independen yang dapat

memverifikasi secara langsung setiap insiden di lapangan sehingga masing-masing pihak tetap berpegang pada versinya sendiri.

Di tengah meningkatnya tekanan internasional, China menegaskan bahwa ASEAN bukan forum yang tepat untuk membahas sengketa maritim bilateral.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China meminta Filipina sebagai ketua bergilir ASEAN menjalankan perannya secara bertanggung jawab.

"Filipina harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua bergilir ASEAN dengan mendorong dialog dan kerja sama, bukan menempatkan kepentingan politiknya di atas perdamaian dan stabilitas kawasan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Beijing yang sejak lama menginginkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui negosiasi langsung dengan negara-negara yang bersengketa, bukan melalui forum multilateral.

Amerika Serikat 'Cawe-cawe'

Di sisi lain, Amerika Serikat 'cawe-cawe' dengan kembali menunjukkan dukungannya kepada Filipina. Departemen Luar Negeri AS mengecam tindakan China yang disebut sebagai aksi "berbahaya dan agresif" terhadap operasi maritim

Filipina yang dinilai sah.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang juga menghadiri pertemuan ASEAN di Manila, diperkirakan akan menggelar pembicaraan bilateral dengan Wang Yi.

Dalam artikel opini yang diterbitkan di sejumlah surat kabar Filipina sebelum menghadiri forum tersebut, Rubio menegaskan komitmen Washington terhadap kebebasan navigasi di Laut China Selatan.

Tanpa menyebut China secara langsung, Rubio mengingatkan bahwa kebebasan pelayaran tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis terjamin. Ia juga kembali menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional tahun 2016 bersifat final dan mengikat serta menyatakan klaim luas China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum.

Memanasnya hubungan China dan Filipina kembali mendorong perhatian terhadap negosiasi Code of Conduct (CoC) atau kode etik perilaku di Laut China Selatan yang telah dibahas ASEAN dan China selama hampir satu dekade.

CoC diharapkan menjadi aturan bersama untuk mencegah bentrokan di laut, mengatur perilaku kapal pemerintah maupun militer, serta membangun mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. (gus,ist,kum/dya)

Seni

Memilih Sepatu Baru Bebas Lecet Kaki

Sepatu baru sering kali menjadi dilema tersendiri dalam dunia mode dan fungsionalitas harian. Di satu sisi, kehadiran sepasang alas kaki anyar mampu meningkatkan kepercayaan diri serta menyempurnakan estetika penampilan secara keseluruhan. Namun di sisi lain, karakteristik material yang masih kaku, baik kulit asli, suede, maupun bahan sintetis tebal, kerap memicu gesekan ekstrem pada epidermis kulit.

Para ahli podiatri (kesehatan kaki) dan dokter spesialis bedah ortopedi sepakat bahwa fase adaptasi sepatu baru tidak harus dilalui dengan rasa sakit. Melalui pendekatan preventif yang tepat, cedera mikroskopis seperti lecet, kapalan, hingga luka lepuh (blisters) dapat dihindari secara total.

Langkah fundamental dalam menghindari risiko cedera ini idealnya dimulai sejak proses kurasi dan pemilihan ukuran di gerai.

Para pakar kesehatan menjelaskan bahwa struktur kaki manusia secara alami akan mengalami ekspansi atau pembengkakan ringan di sore hari akibat akumulasi cairan setelah beraktivitas seharian. Oleh karena itu, proses pengukuran dan pembelian sepatu sangat disarankan untuk dilakukan pada waktu tersebut.

Prinsip utamanya adalah menyisakan ruang sekitar setengah inci antara ujung jari terpanjang dengan ujung dalam sepatu. Sepatu yang terlalu sempit akan memberikan

tekanan konstan pada titik-titik saraf, sementara ukuran yang terlalu longgar justru memicu friksi berulang akibat pergeseran tumit secara vertikal saat kaki melakukan fase lepas landas (toe-off) ketika melangkah.

Selanjutnya, para kritikus dan konsultan mode dunia sering menggarisbawahi pentingnya melakukan proses pelenturan bahan secara bertahap atau yang dikenal dengan istilah break-in period. Kesalahan umum yang sering dilakukan adalah langsung mengenakan sepatu baru untuk perjalanan jauh atau menghadiri acara seharian penuh.

Cara terbaik untuk menjinakkan material yang kaku adalah dengan memakainya di dalam rumah dengan durasi singkat, berkisar antara 30 hingga 60 menit saja setiap harinya.

Langkah ini memberikan kesempatan bagi struktur sepatu untuk melentur dan perlahan mengikuti anatomi unik lekuk kaki tanpa harus mengorbankan kenyamanan aktivitas harian Anda.

Jika area tertentu terasa sangat menjepit, penggunaan alat peregang sepatu (shoe stretcher) atau menyumpal bagian dalam sepatu dengan gulungan kaus kaki tebal saat sedang tidak digunakan dapat membantu mempercepat proses ekspansi material secara aman.

Sebagai bentuk perlindungan mekanis langsung, peran kaus kaki berkualitas menjadi opsi esensial yang

tidak boleh diabaikan. Serat kain pada kaus kaki berperan sebagai bantalan peredam benturan dan friksi langsung antara kulit luar dengan dinding bagian dalam sepatu yang kasar.

Para ahli kedokteran olahraga menjelaskan bahwa pemilihan material kaus kaki yang tepat, seperti campuran katun lembut atau serat sintetis yang memiliki fitur moisture-wicking—sangat krusial untuk menjaga kaki tetap kering. Kondisi kaki yang lembap akibat keringat justru akan meningkatkan koefisien gesekan dan mempercepat pembentukan luka lepuh pada kulit.

Bagi area-area anatomi kaki yang dinilai paling rawan mengalami cedera akibat gesekan, seperti struktur tendon Achilles di tumit belakang, sisi samping ibu jari, serta kelingking, tindakan preventif dapat diperkuat secara spesifik.

Menempelkan plester pelindung medis seperti blister plaster atau plester berbahan gel hidrokloid sebelum sepatu dikenakan terbukti efektif menjadi lapisan kulit kedua yang menerima beban gesekan.

Memanfaatkan kulit bawang untuk berkebun merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan siapa saja. Selain menyuburkan tanah dan mengurangi limbah dapur, kebiasaan ini menjadi bagian dari praktik berkebun ramah lingkungan yang sangat hemat biaya.

Kulit bawang kaya akan nutrisi penting seperti kalium, kalsium, dan magnesium yang efektif memperkuat batang, memicu pertumbuhan akar, serta meningkatkan daya tahan tanaman.

Kandungan aromanya yang khas juga berfungsi sebagai pestisida alami untuk mengusir hama seperti kutu daun tanpa merusak ekosistem

tanah. Pengaplikasiannya pun sangat praktis dan fleksibel. Anda cukup merendam kulit bawang dalam air selama 24–48 jam untuk dijadikan pupuk organik cair, atau langsung menaburkannya di atas media tanam sebagai mulsa penahan kelembapan. Dengan memanfaatkan limbah ini, kita tidak hanya menghemat pengeluaran untuk beli pupuk kimia, tetapi juga aktif menerapkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. (farist/dya)

Tips memilih sepatu nyaman

Beli Sepatu di Sore Hari:
Ukuran kaki mencapai puncaknya di sore hari, mencegah sepatu terasa sempit saat dipakai harian.

Sediakan Ruang Jari (±1,2 cm):
Beri jarak antara ujung jari terpanjang dan sepatu agar jari bisa bergerak bebas.

Kunci Tumit dengan Pas:
Tumit yang pas mencegah gesekan berulang yang memicu luka lecet.

Sesuaikan Bentuk Kaki:
Kaki lebar sebaiknya menghindari sepatu lancip untuk mencegah saraf terjepit dan kapalan.

Uji Fleksibilitas Sol:
Pastikan bagian depan sol mudah ditekuk agar dapat mengikuti gerakan alami kaki saat berjalan.

Ambisi Disinari Matahari 24 Jam 50.000 Cermin Raksasa Diluncurkan



Ambisi manusia untuk merekayasa alam demi pemenuhan kebutuhan energi dan efisiensi industri kini telah melompat melampaui batas atmosfer Bumi. Langkah strategis yang diambil oleh perusahaan rintisan (startup) asal Amerika Serikat, Reflect Orbital, dengan mengantongi izin alokasi frekuensi radio komunikasi dari Komisi Komunikasi Federal (FCC) untuk satelit demonstrasi pertamanya, secara resmi telah menandai babak baru dalam pemanfaatan ruang angkasa secara komersial.

Namun, proyek yang digadang-gadang sebagai terobosan masa depan ini langsung memicu polarisasi tajam di tingkat global, menghadapi potensi lompatan efisiensi ekonomi

dengan risiko kerusakan ekologis skala besar yang dikhawatirkan tidak dapat dipulihkan.

Uji coba perdana melalui peluncuran satelit demonstrasi bernama Earendil-1 menjadi proyeksi awal dari cetak biru yang jauh lebih masif. Dengan memanfaatkan permukaan reflektif sepanjang 18 meter, satelit ini dirancang untuk menangkap sinar Matahari di orbit dan mengarahkannya kembali ke titik-titik koordinat spesifik di belahan Bumi yang sedang mengalami waktu malam.

Keberhasilan fase awal ini direncanakan menjadi fondasi bagi penggelaran lebih dari 50.000 satelit cermin sejenis secara bertahap. Jika target ini terealisasi, jaringan cermin

orbital tersebut diperkirakan mampu mengeliminasi kegelapan pada area seluas lima kilometer persegi per konstelasi, membuka peluang bagi aktivitas manusia untuk terus berjalan tanpa interupsi rotasi Bumi.

Dari sudut pandang utilitarian dan akselerasi industri, teknologi ini menawarkan aplikasi yang sangat luas dan revolusioner.

Sektor energi terbarukan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan, di mana Ladang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat terus memproduksi listrik selama 24 jam penuh tanpa terkendala waktu malam.

Selain itu, dalam skenario darurat, teknologi pemantulan cahaya ini dapat menjadi instrumen krusial bagi misi pencarian dan penyelamatan (search and rescue) saat bencana alam melanda, sehingga memangkas waktu evakuasi secara signifikan.

Di sektor infrastruktur, proyek konstruksi berskala makro dapat melipatgandakan produktivitas dengan sistem kerja tiada henti yang aman bagi para pekerja, sekaligus menekan emisi karbon karena tidak lagi bergantung pada lampu sorot berbasis bahan bakar fosil.

Meskipun demikian, narasi optimistis yang dibangun oleh para investor ruang angkasa ini mendapat tantangan keras dari komunitas ilmiah, astronom, dan pakar lingkungan internasional. Laporan dari berbagai jurnal sains dan media birokrasi kedirgantaraan

menyoroti bahaya laten dari fenomena "langit yang tak pernah tidur".

Para ahli biologi memperingatkan bahwa polusi cahaya buatan berskala orbital ini dapat merusak ritme sirkadian dan navigasi satwa liar, terutama spesies nokturnal dan burung migran yang kelangsungan hidupnya bergantung pada siklus kegelapan alami.

Di samping itu, para astronom mengeluhkan potensi gangguan fatal terhadap teleskop optik berbasis Bumi yang bertugas memetakan benda-benda langit dan mendeteksi ancaman asteroid.

Kekhawatiran yang tidak kalah krusial berpusat pada dampak jangka panjang dari sampah antariksa terhadap atmosfer. Ketika puluhan ribu satelit ini mencapai akhir masa pakainya, mereka akan dideorbit dan dibakar di lapisan termosfer.

Para peneliti atmosfer memperingatkan bahwa pembakaran material satelit dalam volume masif berisiko mengendapkan partikel logam berat oksida di lapisan stratosfer.

Akumulasi zat kimia tersebut dikhawatirkan dapat memicu penipisan lapisan ozon secara tidak sengaja atau mengubah albedo alami Bumi, sebuah bentuk geoengineering yang efek sampingnya belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu pengetahuan saat ini.

Guna meredam skeptisisme publik dan regulasi yang ketat, Reflect Orbital menegaskan bahwa arsitektur keselamatan proyek ini telah dirancang dengan presisi tinggi melalui tiga pilar proteksi. **(farist/dya)**



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Kebangkitan Estetika Liar

Animal Print dalam Street Style

Lanskap mode global dan domestik kembali menyaksikan pergeseran estetika yang dramatis pada pertengahan tahun 2026. Motif komunal bernuansa fauna, kembali mendominasi panggung peragaan busana internasional serta gaya jalanan (street style) metropolitan. Mulai dari corak berani Macan Tutul (Leopard), garis geometris Zebra, hingga abstraksi kulit Sapi (Cow print).

Fenomena ini bukan sekadar siklus tren yang berulang, melainkan sebuah pernyataan kultural yang mendalam mengenai otoritas diri dan pencarian identitas di tengah derasnya arus modernitas digital.

Data internal media mode nasional seperti Beautynesia menegaskan bahwa corak animal print tidak pernah benar-benar lenyap dari radar industri. Sebaliknya, momen kembalinya motif ini hadir dengan pendekatan yang jauh lebih modern, terstruktur, dan adaptif.

Tren ini tercermin secara masif melalui kurasi busana para pesohor global seperti Sofia Richie Grainge hingga supermodel Winnie Harlow, yang secara konsisten mentransformasikan motif ini menjadi sebuah bentuk cerminan kepribadian yang tangguh, eksentrik, sekaligus penuh teka-teki.

Secara historis, penggunaan corak binatang dalam peradaban manusia memiliki akar yang sangat kompleks. Menilik catatan arsip mode global, publikasi Vogue dan The New York Times sering kali mengaitkan motif fauna dengan dualisme simbolis. Pada awal abad ke-20, kepemilikan kulit binatang asli merupakan simbol

absolut kekayaan, hegemoni kelas, dan status sosial aristokrat. Namun, ketika teknologi tekstil berhasil mereplikasi motif ini ke dalam material sintetis pada era 1960-an dan 1970-an, maknanya bergeser secara radikal menjadi simbol perlawanan, kebebasan seksual, dan subkultur rock-and-roll yang menentang kemapanan nilai-nilai borjuis.

Di tahun 2026, kebangkitan kembali motif ini dipicu oleh kejenuhan kolektif terhadap estetika quiet luxury atau kemewahan senyap yang sempat mendominasi pascapandemi. Masyarakat, khususnya Generasi Z dan Milenial akhir, mulai meninggalkan palet warna monokromatis yang polos dan beralih ke bentuk ekspresi yang lebih teatral.

Berdasarkan analisis Business of Fashion (BoF), animal print kini diadopsi sebagai platform ekspresi personal yang menunjukkan sisi berani, tangguh (fierce), namun tetap elegan melalui teknik padu padan yang bersih.

Pakaian bermotif animal print bertindak sebagai proteksi visual sekaligus pernyataan kedaulatan psikologis, di mana dalam era ruang digital yang menuntut keaslian, mengenakan corak yang berani adalah bentuk deklarasi eksistensi yang enggan diseragamkan.

Kembalinya tren ini ke permukaan juga didorong oleh pergeseran cara konsumsi informasi mode. Tercatat viralitas OOTD (Outfit of the Day) di platform visual seperti TikTok dan Instagram memegang peranan krusial.

Kehadiran figur publik, perancang busana independen seperti Brandon Blackwood, serta komunitas kreatif

digital, berhasil mereduksi stigma historis yang sempat melekat pada motif ini, yang dahulu adakalanya dianggap berlebihan atau mencolok, menjadi sebuah item fesyen yang berkelas dan berkarakter.

Menariknya, fleksibilitas motif ini menjadikannya salah satu corak yang paling serbaguna (versatile) dalam lemari pakaian modern. Analisis gaya menunjukkan bahwa animal print mampu bertransformasi secara dinamis tergantung pada tata rias dan struktur busana pendukungnya,

Keseimbangan Visual

Untuk menghindari kesan visual yang terlalu riuh atau tidak beraturan, para pengamat mode dan editor gaya memberikan beberapa rumusan dasar dalam melakukan styling busana bermotif fauna ini, di mana kunci utama dari keberhasilan penampilan ini terletak pada konsep keseimbangan visual dan penekanan pada setiap bagian pakaian.

Implementasi taktis dari tren ini menuntut kejelian dimulai dari bagian atasan yang berfungsi sebagai jangkar visual utama. Ketika sebuah kemeja sutra bercorak leopard atau oversized blazer bermotif zebra dipilih, langkah terbaik adalah meredam intensitas visualnya menggunakan bawahan yang sangat tenang. Mengawinkan atasan bermotif fauna ini dengan celana denim berpotongan high-waist atau celana bahan berwarna hitam polos akan menciptakan kontras yang bersih dan modern. Pendekatan ini memastikan area wajah dan tubuh bagian atas mendapatkan sorotan penuh sebagai statement piece, sementara area bawah bertindak

sebagai penyeimbang yang elegan agar keseluruhan penampilan tidak terkesan berlebihan. Sebaliknya, pergeseran fokus ke bagian bawahan menawarkan dimensi gaya yang tidak kalah atraktif namun terasa lebih bumi. Mengenakan rok satin bersalur macan tutul atau celana berpotongan lebar (wide-leg pants) dengan motif kulit sapi menuntut atasan yang minimalis dan berstruktur kuat.

Fokus Alas Kaki

Bagi mereka yang masih ragu untuk tampil mencolok, infiltrasi motif fauna melalui bagian aksesoris dan alas kaki adalah strategi paling aman namun tetap berdampak besar. Sentuhan kecil berupa tas tangan mini dari Brandon Blackwood bercorak leopard, syal sutra zebra yang diikatkan pada leher, hingga sepasang sepatu bot semata kaki (ankle boots) bermotif serupa, mampu menyulap pakaian kasual yang paling sederhana sekalipun menjadi sangat modis.

Aksesoris Gold

Menambahkan aksesoris bernuansa emas (gold) di area pergelangan tangan atau leher akan melengkapi aksentuasi ini, memberikan sentuhan akhir yang mewah dan bermain (playful) sekaligus kaya tekstur saat disandingkan dengan kain sutra atau satin tanpa harus mendominasi seluruh tubuh.

Fenomena keberlanjutan tren animal print membuktikan satu hukum kausalitas dalam industri mode, bila desain yang memiliki karakter psikologis yang kuat akan selalu menemukan jalan untuk kembali. (farust/dya)

25 Kepala Daerah Studi ...dari Hal 1

Program pengiriman 25 kepala daerah, terdiri atas 23 bupati dan 2 wali kota, ke Singapura memicu perdebatan. Kegiatan bertajuk Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang digagas Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dijadwalkan berlangsung dari 15 hingga 28 Juli 2026.

Tahap awal diisi pembekalan materi wawasan kebangsaan dan antikorupsi di Jakarta pada 15–21 Juli 2026, disusul studi lapangan di Lee Kuan Yew School of Public Policy (NUS), Singapura, pada 22–28 Juli 2026 untuk mempelajari tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan manajemen sumpah.

Kritik tajam mencuat dari parlemen, salah satunya disuarakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mempertanyakan urgensi keberangkatan pejabat ke luar negeri di tengah iklim efisiensi anggaran pemerintah.

"Apakah memang dibutuhkan di masa efisiensi ini? Kita harus betul-betul memilah mana kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mana yang bisa ditunda demi menghemat keuangan negara," tegas Puan dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/7/2026).

Puan menegaskan bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan terkait akan memanggil pihak Lemhannas untuk meminta klarifikasi secara terperinci. Parlemen ingin memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan relevan dengan situasi ekonomi saat ini.

"Untuk Lemhannas, kami nanti akan meminta penjelasan secara detail, di saat masa efisiensi seperti ini dan situasi global seperti ini, apakah memang dibutuhkan untuk mengirim kepala daerah untuk peningkatan capacity building itu sampai ke luar negeri," tegas Puan.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan pentingnya kepekaan pemerintah dan lembaga dalam memilah agenda kerja pejabat di masa efisiensi fiskal. Menurutnya, seluruh instansi harus bersikap selektif dalam menyusun kegiatan agar tidak mencederai semangat penghematan keuangan negara.

"Jadi, nanti mungkin komisi terkait yang akan meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," tambah Puan.

Pernyataan keras dari pimpinan parlemen ini menjadi salah satu

penekan utama yang memicu evaluasi mendalam atas program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III, hingga akhirnya Lemhannas memutuskan untuk mengalihkan skema pelatihan tersebut menjadi sistem dalam jaringan (daring).

Senada dengan pimpinan DPR, Komisi II DPR RI menuntut evaluasi terukur atas keberangkatan ini. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menekankan pentingnya output konkret dari kegiatan tersebut. "Komisi II berharap 25 kepala daerah ke Singapura bisa menyerap inovasi yang benar-benar bisa direplikasi. Jangan sampai ini hanya berakhir sebagai seremonial, tetapi wajib ada action plan nyata yang dirasakan masyarakat di daerah masing-masing," ujar Bahtra.

Menanggapi sorotan publik dan parlemen, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa program KPPD bukan agenda plesiran, melainkan investasi strategis peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah.

"Program KPPD Angkatan III ini dirancang secara terstruktur untuk menggembleng kepala daerah dalam hal tata kelola publik modern dan efisiensi birokrasi. Ini bukan plesiran, melainkan forum studi intensif di mana setiap peserta diwajibkan menyusun proyek perubahan yang harus diimplementasikan dalam waktu 6 hingga 12 bulan setelah kembali," kata Ace Hasan.

Dari sisi regulasi dan perizinan, Kementerian Dalam Negeri memastikan seluruh prosedur administrasi perjalanan dinas telah dipenuhi. Pihak Kemendagri menyampaikan bahwa izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) diterbitkan setelah melalui kajian evaluasi.

"Kemendagri memastikan keberangkatan 25 kepala daerah ini sesuai aturan PDLN yang berlaku. Pasca-kegiatan, para peserta diwajibkan membuat laporan komprehensif dan melakukan evaluasi pemaparan program di BPSD Kemendagri," jelas perwakilan Kemendagri.

Diketahui wali kota yang ikut kegiatan itu adalah Wali Kota Lhokseumawe dan Wali Kota Pangkalpinang. Sementara itu, jajaran bupati yang mewakili wilayah barat hingga tengah Indonesia meliputi Bupati Aceh Besar, Kerinci, Muaro Jambi, Seluma, Tulang Bawang Barat, Lebak, Banjarnegara, Kotawaringin Barat, Sukamara, Hulu Sungai Tengah, Sinjai, Polewali Mandar, Sumbawa Barat, Flores Timur, dan Lembata.

Adapun keterwakilan dari wilayah timur Indonesia diperkuat oleh keberangkatan delapan bupati daerah kepulauan dan kawasan

perbatasan. Mereka adalah Bupati Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Biak Numfor, Manokwari, Intan Jaya, serta Mimika.

Berdasarkan standar regulasi perjalanan dinas luar negeri pejabat daerah, perkiraan biaya transportasi udara dan akomodasi untuk studi lapangan ini berada di kisaran Rp1,21 miliar hingga Rp1,58 miliar. Angka ini dihitung secara kasat mata khusus untuk 25 kepala daerah selama enam malam di Singapura, yang mencakup tiket pesawat kelas bisnis pulang-pergi Jakarta–Singapura sebesar Rp15 juta hingga Rp20 juta per orang, serta tarif penginapan hotel berbintang sesuai batas Standar Biaya Masukan (SBM) Luar Negeri sekitar USD 350 hingga USD 450 per malam.

Penghitungan hipotetis tersebut secara tegas belum memasukkan komponen biaya operasional lainnya, seperti biaya pendidikan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, uang harian (per diem), penerbangan domestik dari daerah asal menuju Jakarta, hingga akomodasi bagi jajaran pendamping dinas.

Pihak penyelenggara sebelumnya menyampaikan rincian skema pembiayaannya, di mana program ini tidak sepenuhnya menggunakan dana APBN murni, melainkan ditopang oleh skema kemitraan kelembagaan antara Lemhannas, Kemendagri, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dan KPK.

Meskipun demikian, pengamat kebijakan publik dan otonomi daerah menilai ada ketidaksesuaian antara objek studi dan kondisi riil daerah di Indonesia. Mantan Dirjen Otda Kemendagri yang juga Guru Besar IPDN, Prof. Djohermansyah Djohan, menyoroti perbedaan karakteristik pemerintahan antara kedua negara.

"Sistem di Singapura itu city-state yang sangat spesifik dan padat. Ketika diterapkan di Indonesia belum tentu cocok. Persoalan utama kepala daerah kita saat ini bukan kurang belajar ke luar negeri, fakta menunjukkan OTT KPK, masalah integritas, dan korupsi tetap terjadi," kata Djohermansyah.

Ia bahkan menyentil efektivitas kunjungan singkat tersebut: "Nanti publik tinggal melihat saja, lebih banyak di ruang kelas atau di Orchard Road. Kalau memang ingin belajar serius, sekolahkan benar-benar. Jangan sekadar beberapa hari kursus lalu sisanya berkeliling."

Dari lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI mengingatkan pentingnya akuntabilitas anggaran dan pengawasan ketat. Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi menyatakan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh.

"Ombudsman mengingatkan Kemendagri dan DPRD untuk

Payung Hukum Utama soal Dinas Luar Negeri

- **Inpres No. 1 Tahun 2026:**
Efisiensi belanja operasional dan perjalanan dinas.
- **PMK SBM 2026:**
Batas biaya perjalanan dinas luar negeri.
- **Permendagri No. 1 Tahun 2026:**
Izin PDLN kepala daerah dan DPRD.
- **SE Menkeu/Mendagri 2026:**
Pedoman efisiensi APBN/APBD.

Kewajiban Efisiensi Anggaran

- Anggaran perjalanan dinas luar negeri **dipangkas 50–70%** dibanding tahun sebelumnya.

Pejabat Negara Tingkat Pusat yang Disorot

- **Menteri PU Dody Hanggodo:**
Draf perjalanan ke New York mencantumkan istri dan anak, memicu kritik soal efisiensi anggaran.
- **Presiden Prabowo Subianto:**
Dikritik karena tingginya frekuensi lawatan ke 29 negara.

Rincian perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo meliputi:

Tahun 2024:
Melakukan 7 kali kunjungan setelah resmi dilantik.

Tahun 2025:
Menjadi tahun paling aktif dengan total 35 kali kunjungan.

Tahun 2026 (Hingga Juni):
Tercatat telah melakukan 12 kali kunjungan



memperketat pengawasan, mulai dari aspek penggunaan anggaran hingga hasil nyata di lapangan. Publik berhak tahu apakah kegiatan luar negeri ini berdampak pada perbaikan kualitas layanan publik atau tidak," kata Ahmad Suadi.

Polemik ini mengemuka di tengah komitmen ketat pemerintah dalam mengendalikan belanja negara sepanjang 2026. Berdasarkan kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM) 2026, pemerintah menargetkan pemangkasan biaya operasional birokrasi secara signifikan, termasuk pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 70% dan dalam negeri hingga 50%, yang hingga pertengahan tahun diperkirakan telah menghemat anggaran negara sekitar Rp1,94 triliun dari total target efisiensi fiskal nasional. (wid,ist,dtc,kum/dya)

KEJUTAN KORUPSI BUPATI LOMBOK BARAT: SUAP ALPHARD HINGGA SAPI KURBAN

Sebuah mobil Toyota Alphard senilai Rp 1,2 miliar dan seekor sapi kurban seharga Rp 17 juta menjadi simbol mencolok dari skandal korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar ada skema proyek bernilai puluhan miliar rupiah di baliknya.

Hasil suap yang diterima Lalu Ahmad Zaini terdiri dari:

- Satu unit mobil Toyota Alphard
Senilai Rp 1,2 Miliar.
- Satu ekor sapi kurban
Senilai Rp 17 juta.
- Satu pasang sepatu mewah merek Hermes
Senilai Rp 19 juta.
- Satu unit telepon genggam iPhone 17 Pro
Senilai Rp 26 juta.
- Fasilitas penerbangan Lombok-Jakarta pulang-pergi (LOP-JKT).



miliar dan sapi kurban seharga Rp 17 juta, bupati juga menerima sepasang sepatu mewah merek Hermes senilai Rp 19 juta, satu unit telepon genggam iPhone 17 Pro senilai Rp 26 juta, uang tunai sekurang-kurangnya Rp 380 juta, serta fasilitas penerbangan rute Lombok-Jakarta pulang-pergi.

Penerimaan suap Alphard hingga sapi kurban tersebut rupanya hanyalah bagian dari muara praktik korupsi yang lebih luas. KPK menemukan fakta bahwa Lalu Ahmad Zaini turut menerima aliran dana besar dari rekayasa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Kasus ini bermula saat Bupati memerintahkan Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi, untuk mengatur agar Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Sudirman, mendapatkan paket-paket pekerjaan daerah. Agar tidak memicu kecurigaan publik, Sudirman menggunakan CV Dyas Karya Konstruksi sebagai penampung dan menyewa nama atau meminjam bendera sejumlah perusahaan kontraktor lain.

"SUD kemudian 'meminjam bendera' kepada sejumlah penyedia, sehingga nama CV DKK tidak tercatat secara administratif sebagai pemenang proyek di Dinas PUPRPKP Lombok Barat. Hal tersebut dilakukan SUD agar CV DKK tidak ter-capture oleh publik, bahwa pengerjaan paket proyek tersebut sarat konflik kepentingan," jelas Achmad Taufik.

Lewat skema pengondisian lelang dan penunjukan langsung, Sudirman mengeruk proyek bernilai total Rp 41,7 miliar di berbagai dinas. Di Dinas PUPRPKP, proyek jalur tender yang

dimenangkan meliputi Rehabilitasi Taman Kota Gerung 2025 senilai Rp 2,3 miliar, Rehabilitasi Taman Kota Gerung Tahap Dua 2026 senilai Rp 4,3 miliar, Pembangunan Gedung Kantor 2025 senilai Rp 2,4 miliar, serta Renovasi Gedung Kantor Bupati senilai Rp 1,7 miliar.

Sementara lewat jalur penunjukan langsung, Sudirman menguasai delapan paket pekerjaan di Dinas PUPR 2025 senilai Rp 3,4 miliar; empat paket di Bagian Umum 2025 senilai Rp 2 miliar, serta 16 paket pekerjaan di perusahaan air minum daerah senilai Rp 1,8 miliar. CV Dyas Karya Konstruksi juga mengembat paket pengerjaan di Bappeda dan Dispora Lombok Barat.

Atas jasa peminjaman nama perusahaan, Sudirman memberikan imbalan atau fee sebesar 3 persen kepada para pemilik bendera. Dari total pengelolaan proyek sebesar Rp 41,7 miliar tersebut, Sudirman diduga mengalirkan dana Rp 10,8 miliar langsung kepada Lalu Ahmad Zaini. Jika ditotal secara keseluruhan dari seluruh rangkaian perkara, akumulasi penerimaan Bupati Lombok Barat mencapai Rp 12,4 miliar.

"Kondisi yang seperti itu biasanya nanti ketika di proses penyidikan, kita

akan minta pengembalian untuk fee yang tidak sah tadi, sehingga itu menjadi juga asset recovery yang akan difokuskan oleh tim penyidik untuk pemulihan keuangan negaranya," tegas Taufik.

Terbongkarnya skandal ini memuncak saat tim penindakan KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan pada 20 Juli 2026 usai mendeteksi penarikan uang tunai Rp 1,25 miliar oleh Sudirman yang hendak diserahkan kepada Bupati. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti bernilai Rp 9,06 miliar, termasuk unit mobil Alphard, serta menetapkan tiga tersangka utama yakni Lalu Ahmad Zaini, Sudirman, dan Alvonsus Gani.

Dalam pendalaman kasus, KPK juga menemukan modus menyembunyikan uang hasil korupsi sebesar Rp 2,25 miliar yang ditempatkan Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman di Rumah Sakit Sisa Sentra Medika dengan dalih investasi saham serta dana operasional Bupati.

"Selain itu, LAZ dan SUD juga diduga menempatkan uang sejumlah Rp 2,25 miliar di Rumah Sakit Sisa Sentra Medika dengan modus pembelian saham ataupun uang operasional Bupati," ungkap Achmad Taufik.

Rangkaian perbuatan ini sejalan dengan terpuruknya indeks integritas Pemkab Lombok Barat dalam Survei Penilaian Integritas KPK 2025 yang merosot tajam dari angka 71,12 menjadi 67,06 atau masuk ke dalam zona merah dan rentan.

Penyidik KPK kini juga tengah mendalami dugaan kepemilikan sekurang-kurangnya 55 bidang tanah milik Lalu Ahmad Zaini yang disinyalir sengaja tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, di luar 24 aset tanah dan bangunan bernilai Rp 14,5 miliar yang ia laporkan secara resmi. (tin,ist,kcm/dya)

